



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke – 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 November 2025
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.36 WIB s.d 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 sampai dengan bulan November 2025. 2. Membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026
Ketua Rapat	: Syaiful Huda, S.I.Kom., M.K.P
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: 31 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.36.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hari ini adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 sampai dengan bulan November 2025 dan membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian realisasinya per 18 November 2025 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	77,65%	79,15%

Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan percepatan penyelesaian program prioritas yang sedang dalam tahap pelaksanaan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU Rumah Umum, Kumuh, dan Sanitasi.

2. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan APBN TA 2026 untuk:
 - a. Mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pada program/kegiatan APBN TA 2026;
 - b. Meningkatkan profesionalisme Pendamping BSPS/Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
 - c. Melakukan evaluasi terhadap data teknis dan persyaratan BSPS yang sulit diimplementasikan oleh penerima manfaat.
3. Komisi V DPR RI mendukung upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasi masalah skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35.WIB.

Jakarta, 19 November 2025

**MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,**
ttd

MARUARAR SIRAIT

KETUA RAPAT,
ttd

SYAIFUL HUDA